

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, oleh karena itu banyak negara lain yang memanfaatkan kekayaan tersebut bahkan lebih banyak dari masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu penyebab hal tersebut ialah karena kurangnya sumber daya manusia yang mendukung dari masyarakat Indonesia sendiri, serta modal untuk menggarap kekayaan alam Indonesia. Sehingga dibutuhkan penyeimbangan atas keadaan tersebut.

Keadaan tersebut dapat berubah menjadi lebih baik jika pihak yang memiliki kepentingan akan hal tersebut dapat memanfaatkan Komitmen Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang secara resmi telah diberlakukan pada 1 Januari 2016. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

Selain itu, pembangunan secara besar – besaran bukan hanya menguntungkan bagi pihak investor, namun bagi pemerintahan dan swasta di Indonesia juga. Hal tersebut menjadi tombak bagi banyak perusahaan negara maupun swasta yang bersaing dalam menarik investor yaitu laporan keuangan. Sehingga, bukan hal yang tabu lagi bagi banyak perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin, dan tentunya banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk menunjang laporan keuangan yang diharapkan.

Fenomena yang telah terjadi yaitu perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ. Dalam laporan yang dipublikasikan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 disebutkan total aktiva perusahaan sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 Miliar. Sedangkan dalam laporan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002, total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan rugi bersih (yang belum diaudit) menjadi Rp 1,3 triliun. Manajemen Lippo beralasan, perbedaan itu terutama pada kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun pada laporan ke BEJ. Akibatnya keseluruhan neraca dan akun-akun berbeda signifikan, termasuk penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen

Dalam Press release bapepam , ternyata terdapat 3 versi laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 september 200, dari 3 versi ini semuanya dinyatakan telah diaudit, yaitu:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;

2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Laporan Keuangan Bank Lippo**

Identifikasi Laporan Keuangan PT Bank Lippo	Tanggal Terbit Laporan Keuangan		
	27-Sep-02	28-Nov-02	6-Jan-03
	Bursa Efek Jakarta	Surat Kabar	Bank Lippo
Nilai Agunan	Rp. 22,8T	Rp 2.393 T	Rp 1,42 T
Total Aktiva	Rp 1.273 T	Rp 24.185 T	Rp 22,8 T
Laba Tahun Berjalan	-	Rp 98,77 M	-
Rugi Bersih	Rp 1.273 T	-	Rp 1,273 T
Rasio Kecukupan Modal	4.23%	24.77%	4.23%
Rasio Kewajiban Minimum	-	-	-

Sumber: Pengolah Data, 2016. Dokumen.tips

Adapun fenomena lainnya, PT Indofarma (Persero) yang merubah status menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT.Indofarma (Persero) Tbk, dengan melakukan penawaran saham perdana sebesar 20% kepada masyarakat dan mencatatkan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode saham INAF. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma Tbk. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti di antaranya, nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi dan nilai yang seharusnya (overstated) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Akibatnya harga Pokok Penjualan

mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated dengan nilai yang sama. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal, angka 2 huruf a Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7, Pedoman Standar Akuntan Publik. Dan selanjutnya sanksi administrasi diberikan berdasarkan pasal 5 huruf n UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal.

Fenomena ketiga ialah mengenai kasus pada PT Kimia Farma, Seperti diketahui, kantor akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa menemukan kesalahan pencatatan laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001. Pada audit per 31 Desember 2001, dipublikasikan laba bersih perseroan sebesar Rp 132 Miliar. Belakangan, Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas mencium adanya ketidakberesan ini, dan meminta akuntan publik yang sama menyajikan kembali (restated) laporan keuangan 2001. Ternyata, laba bersih tahun lalu besarnya hanya Rp 99 Miliar, dan koreksi ini telah disepakati lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kimia Farma. (tempo.co.id, 20 November 2002).

Pujiastuti (2010) melakukan studi komparatif mengenai manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan dengan dasar akrual yang berdasarkan kebijakan manajemen (*discretionary accruals*) atau non kebijakan manajemen (*nondiscretionary accruals*), sehingga pengambilan keputusan menaikkan ataupun menurunkan laba inilah yang disebut tindak manajemen laba. Oleh karena itu, aktivitas manajemen laba tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dalam jangka panjang dapat membuat kebangkrutan bagi

perusahaan dan kehilangan kepercayaan dari pihak - pihak yang berkepentingan (selain manajer perusahaan) seperti pemegang saham karena merasa ketidaknyamanan dalam melakukan investasinya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Pamudji dan Trihartati (2009) mengenai hal-hal yang dilakukan untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu dengan pendekatan akuntansi akrual yang dicatat dengan basis accrual merupakan subjek *managerial discretion*, karena fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP memberikan dorongan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan laba seperti yang diinginkan meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan laba. Akuntansi akrual manajemen laba dikatakan efisien bila *discretionary accrual* akrual berhubungan positif signifikan dengan profitabilitas masa depan yakni, selisih antara *net income* dengan *cash flow from operation* bernilai positif dan dikatakan oportunistik jika tidak berhubungan signifikan atau berhubungan negatif signifikan.

Menurut Harahap (2005:263) laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, serta dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang. Agar perusahaan mendapatkan laba yang tinggi biasanya terdapat campur tangan dari manajemen perusahaan itu sendiri, dalam perusahaan dikenal dengan manajemen laba.

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi

(Robbin, et al., 1993). Penelitian terdahulu memproksi bonus plan dengan ada tidaknya rencana bonus (Robbin, et al., 1993; Inoue dan Thomas, 1996). Pada penelitian ini bonus plan diproksi dengan ada tidaknya rencana kompensasi. Proksi ini dipilih untuk lebih menjelaskan tentang motif memaksimalkan kompensasi. Ada tidaknya rencana bonus menggambarkan hubungan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba jika ada rencana bonus. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Maduretno Widowati (2011) yang menyatakan penentuan ada tidaknya pemberian Bonus Plans yang diterima oleh manajemen dapat diperoleh informasi yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Bonus Plans diukur dengan menggunakan variable dummy dengan ketentuan nilai 1 untuk perusahaan manufaktur yang memberikan kompensasi bonus pada tahun tertentu sedangkan nilai 0 untuk perusahaan manufaktur yang tidak memberikan kompensasi bonus pada tahun tertentu.

Watts & Zimmerman (1990) menyatakan dalam *debt covenant hypothesis* bahwa semakin perusahaan mendekati arah pelanggaran terhadap syarat-syarat utang yang didasarkan pada angka akuntansi, maka *agent* atau manajer akan lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yaitu memindahkan laba periode yang akan datang ke periode berjalan. Faktor *leverage* dalam *earning management* dapat diartikan bahwa *leverage* mempunyai hubungan dengan sumber dana eksternal, yaitu dengan kata lain sumber dana yang berasal dari investor, terutama utang yang digunakan untuk membiayai biaya operasional pada suatu perusahaan.

Dalam *Political Cost Hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politis akan cenderung menurunkan biaya politis tersebut (Scott, 1997). Biaya politis sendiri merupakan biaya yang muncul dari konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Dengan adanya tingkat laba yang tinggi dari perusahaan, maka perusahaan akan mendapat perhatian dari kalangan pemerintah dan masyarakat, sehingga akan menimbulkan biaya politis yang tinggi. Perusahaan akan meminimalisasi laba agar terhindar dari sorotan pemerintah ketika sedang mengalami laba yang tinggi.

Penelitian mengenai *earning management* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula. Faktor-faktor yang diuji mempengaruhi *Earning Management* penelitian sebelumnya adalah:

1. *Leverage* ( Veronika Abdi,2014; Santhi Yuliana,2012; A. Elfira,2013)
2. Ukuran Perusahaan ( Santhi Yuliana, 2012; Halima Shatila,2007)
3. *Earning Power* ( Santhi Yuliana, 2012)
4. Kompensasi Bonus (Yulius Jogi,2014; A. Elfira,2013)
5. Beban Pajak Tangguhan ( Yana Ulfah, 2012)
6. Perencanaan Pajak ( Yana Ulfah, 2012)
7. Kualitas Audit ( Ingrid Christiani, 2012)
8. *Corporate Governance* (Halima Shatila, 2007)
9. Pajak (Veronika Abdi, 2014)
10. *Bonus Plan* (Rochmad Bayu, 2010; Maduretno Widowati, 2011)
11. *Firm Size* (Maduretno Widowati, 2011)
12. Kebijakan Akuntansi (Rochmad Bayu, 2010)



Penelitian ini adalah gabungan penelitian yang dilakukan Rochmad Bayu Utomo (2010). Variabel yang diteliti adalah Pengaruh *Leverage*, *Bonus Plan* dan kekuatan buruh terhadap kebijakan akuntansi. Unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih *purposive sampling*. Dengan hasil penelitian bahwa :

- *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kebijakan akuntansi
- *Bonus Plan* berpengaruh positif terhadap kebijakan akuntansi
- Kebijakan Buruh berpengaruh negative terhadap kebijakan akuntansi

Digabungkan dengan variable dari penelitian yang dilakukan Yana Ulfah (2012), variable yang diteliti adalah Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah sektor perusahaan yang diteliti dan tahun yang diteliti.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis akan meneliti gabungan variable dari kedua penelitian sebelumnya apakah *bonus plan*, *leverage* dan pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *earning management*, dalam hal ini peneliti akan mengambil sub sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang dianggap sebagai sektor yang belakangan ini sedang produktif dalam membangun negeri guna mendukung komitmen Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Konstruksi Bangunan sub sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan menggunakan perusahaan sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yaitu dikarenakan adanya perkembangan pada pembangunan negara yang besar – besaran dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan tentunya melibatkan perusahaan sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan. Industri jasa merupakan salah satu bidang yang sangat berkembang di Indonesia, terutama sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pembangunan mega proyek yang besar-besaran, dan terus tersebar di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan menjadikan sektor Properti, *Real Estate* dan perusahaan Konstruksi Bangunan sebagai salah satu pengguna terbesar APBN Negara dan sebagai penyumbang pajak terbesar setelah sektor pertambangan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian yaitu: “**Pengaruh *Bonus Plan*, *Leverage* dan Pajak Tangguhan terhadap *Earning Management* (Studi pada Perusahaan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2015)**”

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Perusahaan tentunya mengharapkan laba yang besar atas kegiatan usahanya, terlebih dari perusahaan yang dapat *going concern* atau terus eksis dalam kegiatan usahanya. Adapun kewajiban perusahaan untuk membayar pajak terhadap negara

atau *political cost*, pinjaman modal untuk kegiatan usaha dan kompensasi – kompensasi untuk para karyawan menuntut manajemen untuk mengatur laba perusahaan sedemikian rupa. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba secara legal, yaitu tanpa melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku di Indonesia yang notabene nya adalah negara hukum.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Bonus Plan* terhadap pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
3. Bagaimana Pajak Tangguhan pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
4. Bagaimana *Earning management* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
5. Seberapa Besar Pengaruh *Bonus Plan* , *Leverage* dan Pajak Tangguhan terhadap *Earning management* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015 secara simultan dan parsial

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Bonus Plan* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
3. Untuk mengetahui Pajak Tangguhan pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
4. Untuk mengetahui *Earning management* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Bonus Plan* , *Leverage* dan Pajak terhadap *Earning management* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015 secara simultan dan parsial.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan pada berbagai pihak, seperti:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga di mana penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori – teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya tentang *Bonus Plan* , *Leverage* dan Pajak Tanggihan terhadap *Earning management* pada Perusahaan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 2. Bagi Investor

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya.

#### 3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah perusahaan-perusahaan disektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan dengan kriteria perusahaan yang bergerak pada bidang Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2015.